

Bupati Sidoarjo Subandi Sidak Makan Bergizi Gratis di Tarik



SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Bupati Sidoarjo H. Subandi, bersama jajaran Forkopimda, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tarik pada hari Selasa (16/9). Sidak ini bertujuan untuk memastikan kelancaran, kualitas, dan ketepatan sasaran program unggulan pemerintah tersebut.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Bumdesma DAPM Wijaya Mandiri Tarik LKD. Bupati H. Subandi meninjau secara langsung seluruh fasilitas dan proses persiapan makanan, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan.

Dalam peninjauannya, H. Subandi menyatakan kepuasannya terhadap kondisi SPPG tersebut. Menurutnya, semua aspek telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin makanan yang higienis dan bernutrisi bagi para siswa.

“Kami tadi melihat dapur MBG dari tempat penyimpanan bahan baku makanan hingga templat proses penyajian makanan, alhamdulillah telah sesuai dengan standar pemerintah,” ujar H. Subandi di sela-sela kunjungannya.

Rombongan kemudian melanjutkan sidak ke SMPN 1 Tarik untuk memantau langsung proses distribusi dan memastikan para murid menerima makanan sesuai dengan yang seharusnya.

Bupati berdialog dengan beberapa siswa dan guru untuk mendengar respons mereka terhadap menu yang disajikan. Ia menegaskan kembali pentingnya pemenuhan gizi seimbang melalui konsep menu 4 sehat 5 sempurna.

“Menu yang disajikan kepada murid-murid telah baik dan ini perlu dipertahankan untuk standar gizi 4 sehat 5 sempurna,” tutur H. Subandi.

Lebih lanjut, Bupati H. Subandi juga memberikan pesan penting terkait aspek ekonomi dari program MBG. Ia mendorong agar penediaan tenaga kerja di dapur dan pasokan bahan makanan sebisa mungkin

memberdayakan masyarakat dan potensi lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan efek baik dari setiap program pemerintah.

“Sesuai dengan arahan Presiden, tenaga dapur dan pasokan bahan makanan diusahakan dari wilayah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah setempat,” ucapnya.

Dengan memberdayakan lingkungan sekitar, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi penerus, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa dan kecamatan. (ACZ)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Inilah Jawaban Bupati Sidoarjo Terhadap Penjelasan Raperda APBD TA 2026



Sidoarjo – Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Sidoarjo digelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan ke-1 tahun 2025 penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sidoarjo tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (17/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Suyarno didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono yang dihadiri 20 anggota Dewan, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Sekda Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Kepala OPD di lingkup Kabupaten Sidoarjo dan para undangan.

Kemudian, Bupati Sidoarjo, H. Subandi menjelaskan bahwa program dan kegiatan daerah telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2026.

“Pengelolaan APBD harus dilakukan dengan penuh ke hati-hatian mematuhi regulasi yang ada serta kemampuan sumber daya manusia yang profesional dan handal dengan memperhatikan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo”, paparnya.

Dijelaskan pula, rincian rancangan APBD TA 2026 sebagai berikut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 4.727.610.818.931 yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.719.387.926.931, pendapatan transfer sebesar Rp 2.008.222.962.000, anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.129.820.088.931 yang terdiri atas belanja koperasi sebesar Rp 3.717.474.000.866, modal sebesar Rp 582.079.350.791, pengeluaran tidak terduga sebesar Rp 30.000.000.000, transfer sebesar Rp 799.378.000.274, urainya.

Pada komponen pembiayaan daerah sebesar Rp 42.213.000.000 yang terdiri atas pembiayaan penerimaan sebesar Rp 426.500.000.000, pengeluaran pembiayaan sebesar 24.280.000.000, jelas Subandi sambil mengakhiri sambutannya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD dan Pemkab Sidoarjo Rapat Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang IMB



Lensa Nusantara
17/09/2025



Suasana Rapat ParipurnaPencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang IMB

Post Views: 1,147

Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sidoarjo atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam pidatonya, Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa pencabutan Perda IMB merupakan konsekuensi logis dari terbitnya regulasi baru di tingkat nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menggantikan seluruh ketentuan lama, termasuk mekanisme izin. IMB kini resmi berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) beserta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).



"Dengan tidak berlakunya dasar hukum lama, Perda Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Karena itu, perlu adanya pencabutan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan pelayanan perizinan bangunan tetap tertib," ujar Bupati di hadapan pimpinan sidang, anggota DPRD, serta jajaran Forkopimda.

Bupati juga menanggapi secara rinci pandangan fraksi-fraksi. Fraksi PKB menyoroti potensi kekosongan hukum akibat pencabutan perda, namun ditegaskan bahwa mekanisme PBG dan SLF sudah diatur jelas dalam PP 16/2021. Fraksi PDIP menilai perubahan dari IMB ke PBG telah berjalan melalui sosialisasi dan pendampingan, termasuk layanan di Mall Pelayanan Publik.

Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Bupati menyampaikan bahwa SOP penerbitan PBG dan SLF sudah disusun, serta sistem pengajuan berbasis digital melalui SIMBG dipastikan transparan. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Bupati yang memberi pembebasan retribusi.

Sementara itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya aturan turunan berupa Peraturan Bupati. Bupati menjawab, rancangan perbup sedang disusun dan akan ditetapkan beriringan dengan pencabutan perda. Fraksi PAN, PKS, dan PPP turut memberikan catatan soal perlunya pengawasan, kemudahan, dan perlindungan masyarakat kecil.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengantar Nota Keuangan Raperda Kabupaten Sidoarjo APBD 2026



Sidoarjo. Arjunanusanteranews.com, – Pengantar nota keuangan Raperda Kabupaten Sidoarjo APBD 2026. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo rapat ke satu masa persidangan ke satu tahun sidang 2025, penyampaian nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan pada Rabu (17/9/2025) di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tersebut telah dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Sidoarjo H. Suyarno, S.H, M.H, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S. H, M.Kn., Anggota DPRD Forkopimda, para Komandan kepala Kesatuan TNI dan Polri, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, serta kepala instansi vertikal direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu, Rektor Perguruan tinggi dan pimpinan partai politik serta undangan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Suyarno, memimpin dalam persidangan rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada, Rabu (17/9/2025) rapat ke satu masa persidangan ke satu tahun sidang 2025, penyampaian nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2026.

Pada kesempatan ini pula Suyarno mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah dinobatkan sebagai DPRD berkinerja terbaik dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah pada acara penverahan JTV legislatif Jatim Award 2025, pada Selasa (16/9/2025) di Surabaya.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tanggal (16/9/2025) yang dituangkan dalam berita acara rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan acara sebagai berikut:

1. Pembacaan surat masuk
2. Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Berdasarkan laporan sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai daftar hadir anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna dalam persidangan ini sebanyak 20 orang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo rapat ke satu masa persidangan ke satu tahun sidang 2025 pada hari ini, Rabu (17/9/2025) kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Dengan diawali pembacaan surat masuk yang di sampaikan oleh sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Sucahyono. Surat masuk surat Bupati Sidoarjo tanggal 12 September 2025, Nomor 100. 3/10618 /438.1. 1. 3/2025 perihal penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan dymagn senang hati dapat hadir dan berkumpul bersama untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2026.

Dengan fasilitas dan plafon anggaran sementara pada tahun anggaran 2026 merupakan landasan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD pada tahun anggaran 2026. Pengelolaan APBD harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian mematuhi regulasi yang ada serta kemampuan bersumber daya manusia yang profesional dan handal dengan memperhatikan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo maka rancangan APBD pada tahun 2026 disusun dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 4.727 triliun yang terdiri atas Pendapatan asli daerah sebesar 2.719 triliun. Pendapatan transfer sebesar 2,8 triliun. Anggaran Pajak Daerah sebesar 5.129 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar 3.717 triliun. Belanja modal sebesar 582.709 miliar. Belanja tidak terduga sebesar 30 miliar rupiah. Belanja transfer sebesar 799.369 miliar rupiah pada komponen pembiayaan daerah sebesar 42.213 miliar rupiah, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar 426.500 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 24.280 miliar rupiah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang APBD pada tahun anggaran 2026. Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dan disetujui ditetapkan menjadikan peraturan daerah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bimbingan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang di amanatkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. akhir dari penyampaian Bupati Sidoarjo H. Subandi.

Pengantar nota keuangan Raperda Kabupaten Sidoarjo APBD 2026. Suvarno Pimpinan rapat menyampaikan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2026 akan dilakukan oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dan didahului pembahasan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidang tersebut di akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobalalamin. rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo rapat ke satu masa persidangan ke satu tahun sidang 2025 dinyatakan ditutup.

Ainur Rahman Dilantik Menjadi Kepala Bappeda Sidoarjo



ali kusyanto/bhirawa

Pejabat Sidoarjo yang Rabu (17/9), dilantik Bupati di pendopo delta wibawa.

Sidoarjo, Bhirawa

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman, Rabu (17/9) kemarin, dilantik oleh Bupati Sidoarjo Subandi, menggantikan Kepala Bappeda Sidoarjo Hery Soesanto, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi Rusunawa Desa Tambak sawah Kecamatan Waru.

Ainur Rahman, dilantik bersama dengan total 60 orang pejabat Pemkab Sidoarjo lainnya, di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo sisi depan.

Dalam pelantikan itu, total 61 pejabat yang dilantik, terdiri dari 12 orang masuk golongan pejabat tinggi pratama dan 49 orang termasuk pejabat administrator.

61 orang pejabat yang dilantik tersebut mendapat pesan khusus dari Bupati Subandi, agar mereka jujur, berintegritas dan tidak korupsi.

Pelantikan pejabat ini menjawab banyaknya simpang siur, pertanyaan berbagai kalangan, kapan pelantikan pertama di masa kepemimpinan Bupati Subandi dan Wabup Mimik

Idayana, akan dilakukan.

"Pelantikan pejabat di tubuh birokrasi hal yang biasa, supaya mereka berada pada posisi tepat dalam melaksanakan kinerjanya," kata Bupati Subandi, saat memberikan sambutannya, tanpa ada keharifan Wabup Mimik Idayana.

Mereka yang dilantik, diharapkan agar bekerja dengan hati, sehingga saat melayani masyarakat bisa tulus, ikhlas, ramah dan tetap profesional.

"Saya ingatkan lagi, jangan sam-

pai ada pernyataan seperti tidak akan jalan kalau tidak ada uang saku," katanya.

"Selamat bertugas," lanjutnya.

Untuk posisi jabatan tinggi pratama atau kepala dinas, selain M. Ainur Rahman yang digeser menjadi Kepala Bappeda, ada nama Noer Rochmawati Kepala Diskminfo digeser menjadi Kepala BPPD.

Misbahul Munir, Kepala Dinsos digeser menjadi Kepala BKD, Beny Airlangga Kepala Dishub digeser sebagai Asisten Administrasi umum, dr Atok Irawan Asisten Administrasi umum digeser sebagai Dirut RSUD Notopuro. Budi Basuki Kepala BKD digeser menjadi Kepala Dishub.

Sejumlah pejabat memprediksi akan ada pelantikan pejabat susulan. Dikarenakan, dengan pelantikan pejabat tinggi pratama itu, masih menyisakan sejumlah OPD yang pimpinannya masih kosong.

Misalnya Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan, serta posisi Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra masih tetap kosong. Demikian juga posisi Kepala BPBD Sidoarjo juga masih tetap kosong.

Kepala Dinas lain, yang kemarin digeser diantaranya Ridho Prasetyo Kepala Disperpusip digeser sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sementara Rudi Setiawan, Kepala Dinas PM PTSP digeser sebagai Kepala Dinas Disperpusip Sidoarjo. [kus.dre]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPR Delta Artha Dikunjungi Siswa SDN Sudimoro Tulangan



Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Sofia Nur Krisnajati Atmaja, berinteraksi langsung dengan para siswa SDN Sudimoro.

Sidoarjo, Bhirawa

Kegiatan luar kelas (outing class) bagi siswa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, bermacam-macam bentuk dan tempatnya. Ada yang dilakukan di museum mpu Tantular, belajar tentang budaya peninggalan nenek moy-

ang, ada yang di Perpustakaan umum Sidoarjo, belajar literasi dari berbagai macam buku bacaan, ada yang di BPBD Sidoarjo belajar cara memadamkan api bila ada kejadian kebakaran.

Seperti yang dilakukan 30 siswa dari SDN Sudimoro, kemarin, yang didampingi para gu-

runya, berkunjung ke aula pertemuan yang ada di gedung BPR Delta Artha Sidoarjo, yang ada di jalan A.Yani nomor 16 Sidoarjo itu. Mereka ingin tahu cara mengelola keuangan dan belajar menabung sejak dini di BPR tersebut.

Humas BPR Delta Artha Sidoarjo, Yuli, mengaku sangat welcome dengan siswa sekolah di Sidoarjo yang ingin berkunjung dan menambah ilmu tentang tata kelola keuangan ke BPR Delta Artha.

"Kami punya tanggung jawab dalam ikut mendidik masalah ilmu keuangan kepada para pelajar," komentarnya, Rabu (17/9) kemarin.

Setelah kedatangan para siswa dari SDN Sudimoro Kecamatan Tulangan ke BPR Delta Artha, menurut Yuli, kemungkinan akan ada kunjungan lagi dari SD lainnya ke BPR Delta Artha Sidoarjo.

Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Sofia Nur Krisnajati Atmaja, berinteraksi langsung dengan para siswa. Dari berbagai interaksi, Dirinya sempat menanyakan apa ada siswa yang kelak bila dewasa ingin menjadi pegawai bank? Namanya juga masih kecil, para siswa berteriak-teriak dan mengacungkan tangannya. [kus.kt]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Tekankan Gizi Seimbang dan Pemberdayaan Lokal

PT Smelting



Sedikitnya 9 kategori penghargaan diterima PT Smelting di ajang Environmental Social Innovation Awards (ESIA) 2025.

Raih Best of The Best di Ajang ENSIA 2025

GRESIK - Sedikitnya 9 kategori penghargaan diterima PT Smelting di ajang Environmental Social Innovation Awards (ESIA) 2025. Dengan 9 penghargaan ini PT Smelting meraih predikat Best of The Best dalam acara yang diselenggarakan PT Suroinfo di Jakarta, Selasa (16/9).

Sidak MBG di Tarik

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tarik, Selasa sore (16/9/25). Sidak dilakukan untuk memastikan kelancaran, kualitas, dan ketepatan sasaran program unggulan tersebut.

Kunjungan diawali di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dumdesma DAPM Wijaya Mandiri Tarik LKD. Bupati meninjau fasilitas dapur, kebersihan, kualitas bahan baku, hingga SOP pengolahan makanan.

"Kami melihat dapur MBG, dari penyimpanan bahan baku hingga penyajian, alhamdulillah sudah sesuai standar pemerintah," ujar Subandi Selasa sore (16/9/25).

Rombongan lalu melanjutkan sidak ke SMPN 1 Tarik untuk memantau distribusi makanan. Bupati juga berdialog dengan siswa dan guru mengenai menu yang disajikan.

"Menu sudah baik dan memenuhi standar gizi 4 sehat 5 sempurna. Ini harus dipertahankan," tegasnya.

Selain gizi, Bupati menekankan pentingnya aspek ekonomi. Ia mendorong agar tenaga dapur dan pasokan bahan makanan berasal dari masyarakat lokal, sesuai arahan Presiden.

"Dengan melibatkan warga sekitar, program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi desa," jelasnya. ●Loe



Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forkopimda sidak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tarik, Selasa sore (16/9/25).

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Lantik 61 Pejabat Tanpa Kehadiran Wabup

SIDOARJO - Setelah sempat tertunda, mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo akhirnya digelar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/25). Bupati Sidoarjo H. Subandi melantik 61 pejabat eselon II dan III, mulai kepala dinas, camat hingga sekretaris kecamatan. Pelantikan tanpa dihadiri Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana.

Sebanyak delapan pejabat eselon II dilantik, di antaranya M. Ainur Rahman (Kepala Bappeda), dr. Atok Irawan (Ditut RSUD R.T. Notopuro), Budi Basuki (Kepala Dishub), Misbakhul Munir (Kepala BKD), Ridho Prasetyo (Kepala DPMPTSP), Rudi Setyawan (Kepala Perpustakaan dan Kearsipan), Benni Airlangga (Asisten I), serta Noer Rahmawati (Kepala BPPD).

Sementara itu, empat pejabat tetap di posisi semula yakni Anjar S (Inspektur), Redik Kusuma (Kepala Dispendukcapil), Eni Rustiyaningsih (Kepala Dinas Pangan dan Pertanian), serta Edi Kurniadi (Kepala Dinas Koperasi dan UKM).

Di sisi lain, masih terdapat empat jabatan kosong setingkat kepala dinas, yakni Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, dan Kepala Dinas Kesehatan.



Bupati Sidoarjo melantik pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9/25).

Jabatan tersebut rencananya akan diisi pada mutasi berikutnya.

Selain itu, sebanyak 49 pejabat administrator juga dimutasi mulai dari kabag, camat, kapid, hingga sekcab. Namun, pelantikan kali ini tidak dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang tetap berada di

rumah dinas.

Bupati Subandi mengatakan mutasi merupakan hal lumrah dalam birokrasi dan bagian dari upaya pengembangan organisasi pemerintahan.

"Melalui manajemen talenta pegawai, setiap ASN harus siap

ditempatkan di mana saja. Semua penempatan berdasarkan potensi dan integritas sekaligus untuk pengembangan pelayanan. Karena itu, pejabat yang dilantik harus cakap secara administrasi maupun teknis," ujarnya.

Subandi juga menitipkan tiga

pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjaga integritas dengan jujur dan bersih. Kedua, bekerja dengan hati, melayani masyarakat dengan tulus, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, menjalin koordinasi dan kerja sama lintas OPD.

"Emban amanah ini sebaik-baiknya. Dalam pelantikan pertama ini, saya melakukan pembenahan pondasi utama OPD, yakni BKD. Kepala BKD harus membangun komunikasi ke atas sesuai program BKN. BKD adalah taruhan tata kelola ASN," tegasnya.

Ia juga menyinggung pengalamannya saat Pilkada 2024 lalu, bahwa dirinya tidak melibatkan ASN dalam politik praktis.

Subandi mengingatkan agar OPD dan ASN tidak terkotak-kotak. "Saya paling tidak senang dengan kotak-kotakan. Tugas utama kita melayani masyarakat menuju birokrasi yang bersih. Setelah mutasi kedua nanti akan ada pakta integritas. Semua akan kita tata demi pelayanan publik yang lebih baik. Selamat bertugas dan semoga Allah SWT memberi kemudahan," pungkasnya. ● Loe

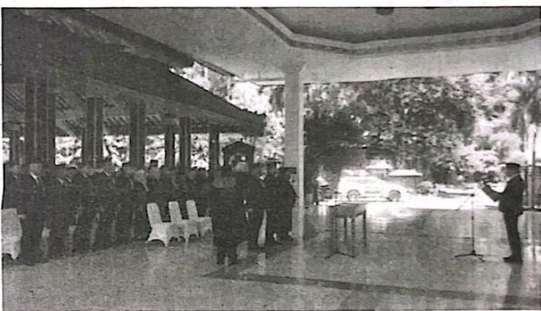
DUTA



Bupati Subandi Mutasi Perdana

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Bupati Sidoarjo Subandi menggelar mutasi perdana pejabat pemkab, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9). Total ada 61 pejabat eselon II dan III yang dimutasi dan dilantik. Rotasi pejabat pemkab ini kali pertama sejak Subandi dilantik sebagai Bupati Sidoarjo pada Februari 2025 lalu. Pejabat tinggi yang dimutasi, diantaranya Budi Basuki yang semula Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kini Kepala Dinas Perhubungan, Ridho Prasetyo dari Dinas Perpustakaan dan Arsip menjadi Kepala DPMTSP. Rudi Setiawan semula

Kepala DPMTSP dimutasi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sedangkan Kepala BKD kini dijabat Misbahul Munir yang semula Kepala Dinas Sosial (Dinsos). Kepala Bappeda kini dijabat Ainur Rahman yang semula Asisten Pemerintahan dan Kesra, menggantikan dr Atok Irawan yang kini menjabat Direktur RSUD RT Notopuro. Sedangkan Benny Airlangga yang semula Kepala Dishub kini menjadi Asisten Administrasi Umum. Untuk Noer Rochmawati yang semula Kepala Diskominfo kini menjadi Kepala Badan Pe-



Bupati Subandi melantik pejabat pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9).
layanan Pajak Daerah (BPPD). Saat melantik para pejabat tersebut, Subandi menegaskan, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi pemerintahan.

Ini bertujuan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. "Mutasi dan promosi ini kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional. ASN yang ditempatkan di posisi baru harus memiliki integritas, komitmen, dan siap mengembangkan kemampuan," tandas Subandi. Subandi juga menekankan pentingnya soliditas antar-OPD agar pelayanan publik berjalan maksimal. ASN diminta mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tim Umsida Sidoarjo Sosialisasi Pemilahan Sampah

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

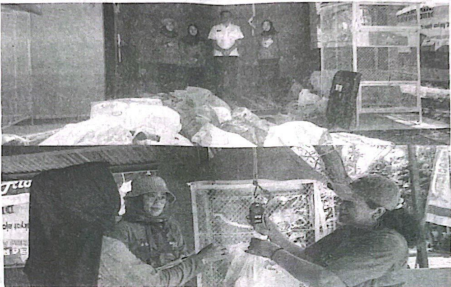
Pengelolaan sampah yang kurang baik masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, termasuk di Desa Suko, Kabupaten Sidoarjo. Sampah yang tidak terkelola dengan tepat, menimbulkan dampak negative. Seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga menurunnya estetika desa. Kondisi ini kian diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah, sehingga penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) belum berjalan optimal.

Pemilahan sampah sejak dari sumbernya sangat penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS). Melalui langkah ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan botol dapat didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi. Kesadaran inilah yang kini tengah digerakkan melalui program ino-

tif dan partisipatif yang dijalankan oleh Desa Suko bersama mitra perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menggelar sosialisasi pemilahan sampah bersama ibu-ibu kelompok dasawisma dan PKK Desa Suko. Kegiatan yang berlangsung pada 17 September 2025 ini merupakan implementasi dari Hibah Dikti yang berfokus pada pengelolaan terpadu sampah organik dan plastik demi mewujudkan lingkungan bersih dan sehat sejak dari rumah tangga.

Totok Wahyu Abadi, narasumber sekaligus Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Umsida, menegaskan pentingnya peran PKK dalam mendukung keberhasilan program ini. “Keterlibatan aktif ibu-ibu PKK akan sangat memudahkan proses pengelolaan sampah karena mereka menjadi penggerak utama di lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi ini, kita ingin menumbuhkan budaya memilah sampah sejak di rumah,” jelasnya.



Sosialisasi tim Umsida untuk pemilahan sampah bersama ibu-ibu PKK Desa Suko.

Dukungan nyata juga datang dari anggota PKK. Bu Budi, salah satu penggerak PKK Desa Suko, mengajak seluruh warga untuk mendukung penuh program kebersihan tersebut. “Kami ingin sukses bersama-sama menjaga kebersihan desa demi

lingkungan yang sehat,” ujarnya. Hal senada disampaikan Hermin, yang menuturkan bahwa warga kini aktif mengumpulkan berbagai jenis sampah mulai dari botol plastik, kertas, hingga minyak jelantah. “Kami semua saling membantu agar pengelolaan sampah

lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar,” tambahnya.

Partisipasi warga pun semakin terasa. Titin, anggota PKK lainnya, berharap semakin banyak warga yang menyerahkan sampah ke bank sampah desa. Menurutnya, jika keterlibatan masyarakat semakin tinggi, pengelolaan sampah akan berjalan lebih lancar dan terintegrasi. “Kami ingin lebih banyak warga ikut aktif, karena semakin besar partisipasi, semakin mudah desa menjaga kebersihan,” katanya.

Untuk memperlancar program, tim pengabdian dan PKK telah menyediakan keranjang sampah di titik-titik strategis desa agar warga lebih mudah memilah sejak di rumah. Selain itu, bank sampah Desa Suko juga menerapkan sistem pengelolaan dana partisipatif melalui model jimpitan. “Sebagai motivasi, hasil pengelolaan ini akan dikaitkan dengan lomba kebersihan antar-RW. Sebanyak 10% dari dana akan dialokasikan sebagai apresiasi bagi tim pengelola bank sampah,” jelas Bu Budi.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Suko tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Dengan dukungan ibu-ibu PKK sebagai motor penggerak dan pendampingan berkelanjutan dari tim Umsida, Desa Suko optimistis dapat menjadi contoh desa yang berhasil mengelola sampah secara terpadu, berkelanjutan, sekaligus bermanfaat bagi perekonomian warga.

Desa Suko buktikan sampah bisa jadi berkah. Lewat gerakan pemilahan oleh ibu-ibu PKK & bank sampah, lingkungan jadi bersih, warga pun dapat manfaat ekonomi. Dari sampah jadi berkah. Pemilahan botol plastik, kertas, hingga minyak jelantah di Desa Suko bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menambah nilai ekonomi warga.

Gotong royong ibu-ibu PKK Desa Suko bikin perubahan nyata. Sampah dipilah, bank sampah berjalan, lingkungan pun makin sehat dan indah. (cat/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga, Jatim

Radar Sidoarjo

RADAR SIDOARJO | KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | HALAMAN 10

ODGJ Diamankan, Sempat Ngamuk Bawa Pisau

TAMAN-Warga RT 8/RW 4, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, dibuat geger pada Rabu (17/9) pagi. Seorang pria berinisial DW, 33, yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ), tiba-tiba mengamuk di rumahnya sambil berteriak histeris dan mengacungkan pisau ke arah ayah kandungnya.

Salah satu tetangga, Hadi, mengaku terkejut ketika mendengar suara keributan dari rumah DW. Dengan sigap, ia segera melaporkan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

"Benar, tadi pagi saya dengar teriakan, terus saya lihat DW bawa sajam. Warga sudah panik. Saya langsung lapor ke pihak terkait dan membantu evakuasi ayahnya ke masjid biar aman," ujarnya.

Aksi DW disebut dipicu masalah uang yang diberikan kakaknya. Sang ibu kandung, UM menjelaskan, anaknya memang sering sensitif terkait uang.

"DW itu marah karena merasa



BIKIN RESAH: Petugas mengamankan diduga ODGJ mengamuk di Sepanjang Taman Sidoarjo, Rabu (17/9).

uang dari kakaknya kurang. Padahal ya memang cuma segitu nominalnya. Dia memang sering sensitif kalau soal uang," tuturnya.

Situasi kian mencekam hingga warga melapor ke Bhabinkamtibmas

Polsek Taman. Tak lama, petugas gabungan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Polsek Taman, relawan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Taman tiba di lokasi untuk mengevakuasi DW.

Meski sempat melakukan perlawanan, pria tersebut akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Sementara itu, Lurah Sepanjang, Hari Purnomo, mengimbau warga agar tidak ragu melapor jika terjadi kasus serupa.

Supaya segera ditangani dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan sosial dari warga sekitar. Ia berharap masyarakat tetap tenang.

"Ini bukan kesalahan siapa-siapa, melainkan kondisi yang butuh perhatian bersama. Yang terpenting, keluarga juga sudah bekerja sama dan kami semua bergerak cepat," tandasnya.

Kini, pihak kelurahan bersama TKSK memastikan DW akan kembali mendapatkan perawatan kejiwaan yang layak. Warga pun diimbau untuk tidak mengucilkan keluarga DW dan mengedepankan empati dalam menghadapi kasus serupa. (dik/gun)



Kondisi Stadion Gelora Delta Tetap Terjaga

SIDOARJO-Stadion Gelora Delta Sidoarjo tetap terjaga usai digunakan laga internasional Timnas U-23 di Kualifikasi Piala Asia 2026. Kondisinya dinilai masih cukup baik dan tidak mengalami kerusakan.

Pengelola Sarana Olahraga Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Suyanto memastikan, seluruh fasilitas stadion dalam keadaan baik. Menurutnya, stadion selalu dipantau setiap hari. "Stadion aman-aman saja, tidak ada kerusakan sama sekali, setiap hari selalu kami jaga," ucapnya.

Perawatan lapangan juga dilakukan rutin agar tetap siap dipakai. Rumput disiram dua kali sehari, pukul 07.00 dan 16.00, masing-masing sekitar 30 menit.

"Dengan perawatan rutin, kondisi rumput tetap hijau dan terjaga," jelasnya.

Selain itu, kebersihan stadion juga selalu dijaga. Sampah dari dalam maupun luar



DIRAWAT: Stadion Gelora Delta, Sidoarjo saat digunakan laga internasional Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

stadion dibersihkan setiap hari. "Proses penyiraman, pembersihan sampai penanganan sampah kami lakukan secara menyeluruh," terangnya.

Meski akses masuk stadion lebih dibatasi untuk keamanan, masyarakat

tetap diberi ruang berolahraga. Pintu B dibuka setiap hari, sedangkan pintu H dibuka khusus hari Minggu.

Stadion Gelora Delta juga tidak hanya dipakai untuk sepak bola. Fasilitas atletik yang ada bisa

dimanfaatkan untuk latihan maupun kejuaraan. Dengan fasilitas itu, Stadion Gelora Delta menjadi ruang olahraga multifungsi. Stadion ini sekaligus menjadi kebanggaan warga Kota Delta. (sai/gun)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Operasi Pasar Beras Murah Digelar di Tiap Desa



POSLEBIH MURAH: Warga antri membeli beras SPHP 5 kg dengan harga Rp 55.000 di Balai Desa Banjarbendo kemarin (17/9). Pemkab Sidoarjo menggelar operasi pasar beras murah hingga Oktober.

Disperindag Gelontor 36 Ton Per Hari

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo mulai menggelar operasi pasar beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tiap-tiap desa atau kelurahan kemarin (17/9). Dalam sehari, Pemkab menggelontorkan 36 ton beras ke 24 desa atau kelurahan secara bergantian.

Kepala Disperindag Sidoarjo Widiyantoro Basuki me-

ngatakan, operasi pasar SPHP dilakukan mulai pukul 08.00 hingga 12.00. Ia meminta pemerintah desa menyiapkan lokasi penjualan dan membantu sosialisasi kepada warga. "Targetnya beras yang kami bawa harus habis terjual di lokasi," katanya.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Dalam tahap pertama hanya 1,5 ton beras atau 300 kemasan beras SPHP lima kiloan yang diturunkan ke tiap desa. Tahap pertama akan berlangsung hingga 30

September mendatang. Tahap kedua dimulai Oktober. "Per desa desa dapat 3 ton, disalurkan dua tahap. Bahkan pada akhir pekan, Sabtu (20/9) dan Minggu (21/9), penjualan tetap kami laksanakan," ujarnya.

Widiyantoro menargetkan sebanyak 6.750 ton beras SPHP bisa tersalurkan. Saat ini baru 1.592 ton yang sudah tersalur. Sehingga, masih ada sisa sekitar 5.158 ton beras yang akan digelontorkan ke masyarakat. (eza/uzi)

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • KAMIS 18 SEPTEMBER TAHUN 2025 | HALAMAN 18

Benahi Birokrasi Pemkab, Bupati Rotasi 60 Pejabat

Kepala DPMPTSP-
Disperpusip Tukar Posisi

SIDOARJO - Sebanyak 60 pejabat ASN Pemkab Sidoarjo, mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat administrasi dirotasi. Pelantikan dan sumpah jabatan digelar di Pendopo Delta Wibawa kemarin (17/9).

Mutasi kemarin merupakan yang pertama di masa jabatan Bupati Subandi. Subandi mengatakan, rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Sidoarjo lumrah terjadi dalam sistem birokrasi. Menurutnya, semua pejabat yang dimutasi sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. "Mutasi dan promosi ini kami lakukan secara adil, objektif, dan profesional," ujarnya selepas membacakan sumpah dalam pelantikan pejabat. Menurutnya pelantikan pertama ini menjadi momentum awal dalam melakukan pembenaan birokrasi di Sidoarjo.

Tukar Posisi

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah nama menempati tempat baru. Seperti Muhammad Ainur Rahman yang sebelumnya merupakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan



TEMPAT BARU: Wahyu Herison (dua dari kanan), Andjar Surjadianto (tengah), Mohammad Ainur Rahman (dua dari kiri), dan pejabat lainnya melakukan sumpah janji saat prosesi pelantikan pejabat Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin (17/9).



Mutasi dan promosi ini kami lakukan secara adil, objektif, dan profesional."

Subandi
Bupati Sidoarjo

Kesra, kini resmi menjadi Kepala Bappeda Sidoarjo. (selengkapnya lihat grafis). Ada pula yang tukar posisi. Rudi Setiawan yang sebelumnya menjabat kepala DPMPTSP kini menjabat

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, tukar posisi dengan Ridho Prasetyo.

Pejabat Harus Jujur

Subandi berpesan agar setiap pejabat yang ditem-

patkan di posisi baru harus memiliki integritas, komitmen, dan siap mengembangkan kemampuan. "Kami ingin pejabat-pejabat Sidoarjo punya integritas, jujur, dan anti korupsi," paparnya.

Dia menyebut, BKD memiliki peran vital dalam pembinaan integritas ASN. "Saya minta BKD selalu berkoordinasi dengan baik. Apalagi di Sidoarjo ada kan-

Pejabat Tinggi Tempati Posisi Baru

Budi Basuki
Kepala Dishub
Ridho Prasetyo
Kepala DPMPTSP
Rudi Setiawan
Kepala Disperpusip
Noer Rochmawati
Kepala BPPD
dr Atok Irawan
Direktur RSUD RT Notopuro
Beny Airlangga Yogaswara
Asisten Administrasi Umum
Misbahul Munir
Kepala BKD
Ainur Rahman
Kepala Bappeda

SUMBER: PEMKAB SIDOARJO

tor BKN, maka pembinaan ASN harus sesuai sistem yang ada," paparnya.

Sesuai Ketentuan

Plt Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Basuki Ari Wicaksono menegaskan bahwa proses mutasi jabatan di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari persyaratan dan pengajuan izin ke BKN Pusat dan telah disetujui. "Sudah menjadi kewenangan dari bupati untuk melantik dan mengeluarkan SK. Semua sudah sesuai dengan aturan," jelasnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Bupati Subandi Mutasi Perdana Kepala OPD di Pemkab Sidoarjo, Berikut Nama-Namanya



IMESINDONESIA, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi melakukan mutasi dan rotasi pejabat tinggi pratama serta pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Perombakan ini menjadi yang pertama sejak Subandi resmi dilantik sebagai Bupati Sidoarjo pada Februari 2025 lalu.

Sejumlah pejabat tinggi yang dilakukan mutasi di antaranya adalah Budi Basuki dari Kepala BKD menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Ridho Prasetyo dari Dinas Perpustakaan menjadi Kepala DPMPTSP.

Bupati Subandi menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

“Mutasi dan promosi ini kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional. ASN yang ditempatkan di posisi baru harus memiliki integritas, komitmen, dan siap mengembangkan kemampuan,” ujar Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025).

Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen mengembangkan manajemen talenta terbaik yang visioner serta mampu menjawab tuntutan zaman. Menurutnya, tantangan pelayanan publik semakin kompleks sehingga aparatur dituntut lebih kreatif, cekatan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jaga integritas. Jadilah pejabat yang jujur dan anti korupsi. Bekerjalah dengan hati, layani masyarakat dengan tulus, ramah, dan penuh dedikasi,” pesan Subandi.

Pada kesempatan itu, Bupati Subandi juga menekankan pentingnya soliditas antar-OPD agar pelayanan publik berjalan maksimal. ASN diminta mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Subandi menyebut, pelantikan perdana ini menjadi momentum awal dalam melakukan pembenahan birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan pondasi utama dalam menjaga tata kelola ASN.

"Saya minta BKD selalu berkoordinasi dengan baik. Apalagi di Sidoarjo ada kantor BKN, maka pembinaan ASN harus sesuai sistem yang ada," tegasnya.

Sementara, Plt Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Basuki Ari Wicaksono menegaskan bahwa proses mutasi jabatan di Kabupaten Sidoarjo sudah ketentuan yang berlaku.

Mulai dari persyaratan dan pengajuan izin ke BKN Pusat dan telah disetujui. "Sehingga sudah menjadi kewenangan dari bupati untuk melantik dan mengeluarkan SK. Dan semua sudah sesuai dengan aturan," jelasnya.

Berikut Daftar Sejumlah Pejabat Tinggi Pratama yang Dimutasi

1. Budi Basuki Kepala Dishub Sidoarjo
2. M. Ainur Rahman Kepala Bapeda Sidoarjo
3. Ridho Prasetyo Kepala DPMPTSP Sidoarjo
4. Rudi Setiawan Kepala Perpustakaan
5. dr. Atok Irawan Direktur RSUD RT Notopuro
6. Misbahul Munir Kepala BKD Sidoarjo
7. Benny Airangga Asisten Administrasi Umum
8. Noer Rochmawati Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo (*)



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

PENYEGARAN: Bupati Sidoarjo, Subandi melantik para pejabat hasil mutasi dan rotasi di Pendopo Delta Wibawa.

Bupati Subandi Rotasi 60 Pejabat Pemkab Sidoarjo

SIDOARJO-Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan mutasi dan rotasi terhadap pejabat tinggi prama serta pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9). Total ada 60 pejabat Pemkab Sidoarjo yang dimutasi dan dirotasi. Perombakan ini menjadi awal penyegaran birokrasi di Kota Delta.

Sejumlah pejabat tinggi yang terkena rotasi di antaranya Budi

FENOMENA

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

la BKD menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian, Ridho Prasetyo dari Dinas Perpustakaan menjadi Kepala DPMPTSP dan M. Ainur Rahman dari Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan kini menjabat Kepala Bappeda Sidoarjo.

Selain itu, Rudi Setiawan dari DPMPTSP dipindah menjadi Ke-



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

RESMI: Bupati Sidoarjo, Subandi saat bersalaman dengan Kepala Bappeda Sidoarjo yang baru saja dilantik, Muhammad Ainur Rahman.

pala Perpustakaan. Lalu, Misbahul Munir dari Dinsos Sidoarjo ditugaskan sebagai Kepala BKD Sidoarjo.

Benny Airlangga dari Kepala Dishub bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum. Sedangkan Noer Rochmawati dari Kepala Diskominfo kini memimpin Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) dan dr. Atok Irawan ditetapkan sebagai Direktur RSUD R.T. Notopuro.

Subandi mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Hal itu ditujukan untuk menempatkan ASN sesuai keahlian dan kemampuannya.

"Mutasi dan promosi ini dilakukan secara adil, objektif, dan profesional, ASN yang menempati posisi baru harus memiliki integritas, komitmen dan siap mengembangkan kemampuan," ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen mengembangkan manajemen talenta yang visioner.

● Ke Halaman 10

Bupati Subandi...

ASN dituntut lebih kreatif, cekatan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Jaga integritas, jadilah pejabat yang jujur dan anti korupsi, layani masyarakat dengan tulus, ramah dan penuh dedikasi," katanya.

Subandi menekankan, pentingnya soliditas antar-OPD. Karenanya, ASN diminta mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk pelayanan publik maksimal.

Baginya, pelantikan perdana sejak ia menjabat sebagai Bupati menjadi momentum pembenahan birokrasi di

Kabupaten Sidoarjo. Terlebih pada BKD sebagai pondasi utama dalam menjaga tata kelola ASN.

"Saya minta BKD selalu berkoordinasi dengan baik, apalagi di Sidoarjo ada kantor BKN, maka pembinaan ASN harus sesuai sistem yang ada," pungkasnya. (sai/gun)